SRADDHA ABYAKTA
Jurnal Pendidikan dan Humaniora
E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX
Satu Arus Kebudayaan: Suatu Alternatif Memperkuat Nasionalisme dan Integrasi Indonesia

Sulistya Putri[1]
[1]MAN 1 Jepara, Jepara, Indonesia
*Alamat korespondensi: 123456789sulis@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2023 | **Direvisi:** 31 Maret 2023 | **Disetujui:** 3 April 2023

Abstract

The development of globalization continues to erode the national culture until a threat arises against the integration or integrity of the nation. This research aims to find a suitable format for cultural diversity and cultural expansion from outside. The method used in this study is a historical method with a cultural approach. Culture as one of the national identities becomes an important part of awakening nationalism through memories of the nation's cultural history. Therefore a cultural current is needed to strengthen national identity. One current culture can be pursued by caring for the cultures, because the memory of one nation based on ethno-symbolism theory can increase a sense of nationalism and national integration.

Keywords: *Culture, Nationalism, Integration.*

Abstrak

Perkembangan globalisasi terus menggerus kebudayaan nasional hingga muncul ancaman terhadap integrasi ataupun keutuhan bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan format yang pas terhadap keanekaragaman budaya dan ekspansi budaya dari luar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan budaya. Budaya sebagai salah satu identitas bangsa menjadi bagian penting untuk memunculkan nasionalisme melalui ingatan kolektif sejarah kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, satu arus kebudayaan diperlukan untuk memperkuat identitas nasional. Satu arus kebudayaan dapat diupayakan dengan merawat kebudayaan-kebudayaan, karena ingatan kolektif suatu bangsa berdasar teori etno-simbolisme dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan integrasi bangsa.

Kata kunci: Kebudayaan, Nasionalisme, Integrasi.

Pendahuluan

Upaya integrasi bidang kebudayaan dilihat dari latar belakang Indonesia secara historis dapat dilakukan dengan menciptakan satu arus kebudayaan. Artikel ini akan secara lebih detail membahas mengenai satu arus kebudayaan sebagai alternatif penguatan nasionalisme dan integrasi Indonesia ke depan ditinjau dari sudut pandang historis. Dewasa ini perkembangan budaya semakin bersifat kompleks karena adanya arus globalisasi. Hal tersebut memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil kebudayaan semakin beraneka ragam. Namun di lain sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga dapat menjadi suatu ancaman untuk integrasi nasional suatu bangsa. Sebagai contoh, dengan adanya ekspansi kebudayaan asing ke Indonesia maka muncullah gaya hidup baru seperti adanya budaya populer seperti musik K-Pop yang memberikan pengaruh terhadap generasi muda dalam bidang *fashion*, gaya bahasa, ataupun kuliner dan lain-lain (Heryanto, 2018: 243). Jauh sebelum munculnya budaya pop, pada masa penjajahan telah terjadi ekspansi kebudayaan berupa komunikasi (bahasa), berpakaian (*fashion*), musik ataupun tarian-tarian yang berasal dari luar negeri. Terlebih bercokolnya kolonialisme di Hindia Belanda juga memberikan corak kebudayaan sehingga muncul akulturasi seperti munculnya bangunan Indische. Ditarik lebih jauh lagi pada masa Hindu-Budha terdapat kebudayaan Cina dan

India yang dibuktikan adanya peninggalan-peninggalan (artefak-artefak) yang ada di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan sejarah kebudayaan yang salah satu akibatnya disintegrasi terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal ataupun nasional. Selain itu, masuknya kebudayaan luar semakin menggerus kebudayaan lokal yang menjadi identitas jati diri bangsa. Oleh karena itu, guna merespon ekspansi budaya luar yang terus menghegemoni bangsa Indonesia, diperlukan satu arus kebudayaan sebagai sebuah alternatif. Dengan latar belakang tersebut, maka dimunculkan pertanyaan penelitian mengapa satu arus kebudayaan menjadi alternatif penguatan nasionalisme dan integrasi bangsa Indonesia?

Sebelum membahas lebih jauh perlu dipahami beberapa konsep mengenai kebudayaan, nasionalisme, dan integrasi bangsa untuk memahami secara utuh pikiran mendasar artikel ini. Pertama, konsep kebudayaan sendiri juga memiliki berbagai macam pengertian. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa kebudayaan akan muncul dari setiap manusia yang sedang berproses dalam kehidupan (Koentjaraningrat, 1990: 180). Kebudayaan dalam perkembangannya menjadi identitas suatu etnik dan bangsa. Makin tinggi kebudayaan suatu etnik dan bangsa maka makin tinggi pula peradaban bangsa tersebut. Setelah kemerdekaan, salah satu bagian yang difokuskan untuk mempertinggi nasionalisme bangsa adalah kebudayaan. Sedangkan nasionalisme menurut KBBI adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (KBBI Online). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dalam nasionalisme juga erat kaitannya dengan mempertahankan eksistensi identitas kebudayaan suatu bangsa yang menunjukkan kepribadian bangsa itu sendiri.

Berdasar pada pengertian konsep nasionalisme dan kebudayaan di atas, maka dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan etno-simbolis yang ditawarkan oleh Anthony D. Smith dalam bukunya berjudul “Nasionalisme (Teori, Ideologi Sejarah)”. Smith mengungkapkan bahwa nasionalisme dan bangsa merupakan bagian dari keluarga identitas dan aspirasi kolektif etno-kultural yang lebih luas. Kalangan etno-simbolis mengajukan penjelasan historis dan/atau sosiologis mengenai sebab-sebab kelekatan emosional yang berkesinambungan dari begitu banyak orang terhadap komunitas etnik dan bangsa mereka, juga penyebab kapasitas mereka untuk melakukan terorisme fanatik dan pengorbanan diri demi kepentingan mereka (Smith, 2002: 73). Paradigma tersebut menjadi pisau analisis untuk melihat nasionalisme dan kelekatan kolektif terutama bidang kebudayaan, sehingga memunculkan adanya integrasi bangsa.

Integrasi sendiri merupakan konsep yang selalu hadir dalam masyarakat majemuk Indonesia ini. Integrasi pada bidang kebudayaan sendiri merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat (Tim Penulis, 1996: 31). Integrasi di Indonesia sendiri muncul atas kesadaran bahwa Indonesia memiliki masyarakat dan kebudayaan yang sangat majemuk, namun dalam suatu integrasi kebudayaan terdapat sistim yang universal. Sehingga selain kesaran terhadap perbedaan juga terdapat ikatan sistim- sistim kebudayaan universal yang berkembang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan beberapa tahapan, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1975: 18). Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan sumber-sumber baik berupa fakta-fakta di lapangan melalui penelusuran berita maupun studi literatur di Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro. Kemudian sumber yang telah ditemukan dikritik secara eksternal dan internal. Selanjutnya adalah proses interpretasi, pada proses ini sumber-sumber yang telah didapatkan ditafsirkan dan kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai yakni teori etno-simbolik. Proses terakhir dalam metode ini yakni heuristik disesuaikan dengan kaidah selingkung jurnal dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Historisitas Kebudayaan

Klausa budaya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, yang menggunakan kata-kata yang sama seperti tahun UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) 1949 menyatakan, "Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan" (Pasal 40 UU D 1950 dan Pasal 38 Konstitusi RIS). Kebudayaan mendapatkan sorotan penting dalam pengembangan *nation building* sebagai bangsa yang baru saja mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda, terutama kebebasan individu berlandaskan konstitusi tahun 1950.

Empat konvensi budaya yang disponsori negara yang diadakan antara tahun 1948 dan 1954 merupakan jendela yang penting ke dalam rumusan kebijakan budaya dari elite politik dan budaya, termasuk menteri, birokrat tingkat tinggi, dan komentator budaya terkemuka periode awal kemerdekaan (Jones, 2015: 83). Setelah itu banyak dilakukan kongres-kongres kebudayaan yang berjuang menentukan arah kebudayaan bangsa. Selain itu perdebatan budaya untuk mengikuti Barat atau Timur juga masih terlihat jelas dalam kongres-kongres kebudayaan yang telah berlaku. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Hatta mengakui pentingnya "kebudayaan" bagi pemerintahan untuk penyelenggaraan negara: "Penyelenggaraan suatu negara mampu membawa kesejahteraan jika kebudayaan ditempatkan pada tingkat yang tinggi, karena kebudayaan juga memengaruhi sifat pemerintahan suatu negara". Kemudian dalam pidatonya itu, ia menggabungkan pentingnya kebudayaan bagi sebuah negara bersama-sama dengan tujuan negara: "Tujuan negara adalah untuk memberikan cara hidup yang wajar bagi semua penduduknya, dan negara hanya dapat bertahan jika kebudayaannya sehat dan bertaraf tinggi" (Jones, 2015: 83). Oleh karena itu, pada masa ini muncul berbagai lembaga kebudayaan yang yang mulai eksis di tengah-tengah masyarakat.

Foulcher dalam Jones (2015) menjelaskan bahwa lembaga kebudayaan yang eksis di awal kemerdekaan di antaranya adalah Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dibentuk hanya sepuluh hari setelah konferensi sebagai respons terhadap kekecewaan atas arahan yang diambil oleh para peserta berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian Lekra berkembang mejadi lembaga kebudayaan yang cukup menonjol pada masa Demokrasi Terpimpin, namun dibubarkan

bersama pemburan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain Lekra juga muncul Lesbumi yang lebih berbasis keagamaan khususnya Islam dan Manikebu yang lebih bersifat Humanisme Universal, selain itu dibentuk beberapa konservatori kesenian di berbagai wilayah. Selain itu istilah yang lazim dipakai pada masa tersebut adalah "Politik Sebagai Sastra", "Seni untuk Seni", "Humanisme Universal" gencar muncul di media cetak 1960an (Suparto, 2000: 11).

Dalam perkembangannya, lembaga kebudayaan tersebut mengalami kontestasi ideologi yang dikembangkan meskipun semuanya berlandaskan nasionalisme untuk mempertahankan kebudayaan, bangsa, dan negara. Perbedaan ideologi yang menonjol secara masif dilontarkan melalui karya-karya yang dihasilkan oleh Lekra atau Manikebu. Perseteruan antara sastrawan Manikebu dan Lekra, dengan tokohnya yang penting adalah Taufiq Ismail dan Pramoedya Ananta Toer menjadi bagian yang cukup penting bagi sejarah perkembangan sastra Indonesia (Wahyuni, 2015: 6). Namun demikian pada 1963 Manikebu dibubarkan oleh Sukarno.

Setelah bubarnya beberapa lembaga kebudayaan tersebut, kebudayaan Indonesia tidak memiliki arah yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan masuknya berbagai kebudayaan luar (kebudayaan populer luar) yang semakin lekat dengan generasi muda bangsa Indonesia. Dengan semakin melemahnya kebudayaan Indonesia, tentu semakin besar ancaman terhadap integrasi bangsa, karena kebudayaan menjadi bagian penting dalam bersatunya bangsa.

Satu Arus Kebudayaan sebagai Penguat Nasionalisme dan Integrasi Bangsa

Berdasar pemaparan secara historis di atas maka perlu dibentuk suatu arus kebudayaan nasional yang dijadikan sebagai penguat nasionalisme melalui penguatan identitas dan jati diri bangsa. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki berbagai kebudayaan yang beragam. Kebudayaan akan menjadi grada terdepan dalam membentuk pola pikir masyarakat, menjadi penting. Hal ini sebenarnya juga pernah diusahan oleh para penggagas arah kebudayaan bangsa sebelum kemerdekaan, untuk membentuk suatu identitas bersama bangsa Indonesia. Seperti usulan dari Sutan Takdir Alisjahbana bahwa zaman pra-Indonesia, zaman jahiliah Indonesia, itu setinggi-tingginya hanya dapat menegaskan pandangan tentang lahirnya zaman Indonesia. Namun zaman Indonesia sama sekali bukan kelanjutan atau bentuknya, kedua berbeda. Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru bukanlah kelanjutan dari yang telah ada (Tim Penulis, 2015). Pendapat Alisjahbana tersebut menunjukkan perlu adanya kebudayaan baru sebagai identitas bangsa untuk mengikat perbedaan masyarakat yang majemuk. Kebudayaan inilah yang perlu dijaga untuk memertahankan integrasi nasional dalam satu arus kebudayaan.

Satu arus kebudayaan yang dimaksudkan di sini adalah memelihara kebudayaan-kebudayaan nasional agar terus melekat dalam pribadi masyarakat secara khusus dan bangsa secara umum. Hal tersebut tentunya akan ikut serta memupuk nasionalisme yang disebabkan oleh ingatan kolektif rakyat, atau yang diistilahkan Smith sebagai etno-simbolis. Simbol-simbol yang muncul dalam kebudayaan seperti tarian, sastra, musik dijadikan sebagai pengikat masyarakat untuk membendung kekuatan asing. Kuatnya ingatan kolektif masyarakat akan semkain erat dalam ikatan sosial, memiliki kesadaran kebudayaan yang sama dan bernilai tinggi, dengan demikian ingatan kolektif ini akan memicu munculnya nasionalisme bangsa. Selaras dengan munculnya

nasionalisme dengan adanya ingatan kolektif yang sama juga akan menguatkan integrasi bangsa. Dengan demikian satu arus kebudayaan sangat penting untuk menjaga semangat nasionalisme dan integrasi bangsa. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun satu arus kebudayaan yakni.

1. Peran Pemerintah Melalui Regulasi Tentang Kebudayaan

   Regulasi yang berkaitan arah kebudayaan Indonesia hingga saat ini terbilang cukup bagus. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU RI Nomor 5 tahun 2017). Namun implementasi yang ada di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Hal ini karenakan kurang adanya kerjasama dari semua aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga perlu dilibatkan organisasi-organisasi kebudayaan untuk mendukung regulasi yang telah disepakati bersama berdasar pada dasar negara yaitu Pancasila. Pengambilan kebijakan juga tidak bisa dilepaskan dari akar historis masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga harus dibentuk suatu arus kebudayaan yang mewadahi kemajemukan kebudayaan Indonesia.

2. Peran Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

   Generasi Indonesia khususnya generasi muda mengalami adanya krisis indentitas yang telah banya dibahas dalam buku "Identitas dan Kenikmatan" karya Ariel Heryanto. Hal ini dibarengi dengan adanya arus global melalui teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Oleh karena itu perlu adanya peran lembaga pendidikan ataupun lembaga kebudayaan untuk terus memelihara kebudayaan bangsa sehingga menggerus adanya krisis identitas nasional yang mengancam integrasi bangsa.

3. Peran Masyarakat

   Integrasi bidang kebudayaan adalah integrasi yang ada pada lapisan paling mendasar. Sehingga diperlukan pernanan masyarakat untuk terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan bangsa untuk terus tetap eksis menjaga identitas bangsa. Dalam hal ini semua lapisan masyrakakat harus bekerjasama melestarikan kebudayaan baik kebudayaan lokal atau daerah maupun kebudayaan nasional.

Simpulan

Arus kebudayaan dapat menjadi satu alternatif integrasi bangsa. Hal tersebut tidak terlepas dari historisitas bangsa Indoensia yang sempat mengelami perbedaan struktur politik namun tetap memiliki kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan terdaat kesadaran untuk bersatu meski memiliki berbagai kebudayaan dengan membentuk kebudayaan bersama atau yang sering diistilahkan sebagai kebudayaan nasional.

Kebudayaan pada awal kemerdekaan Indonesia mendapatan porsi yang penting terutama dibuktikan dengan adanya klausa budaya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, yang menggunakan kata-kata yang sama seperti tahun UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) 1949 menyatakan, penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kebudayaan berkembang secara pesat hingga akhirnya terdapat

polemik kebudayaan pasca 1965. Polemik kebudayaan dibarengi dengan adanya arus globalisasi sendiri mengancam identitas budaya bangsa. Satu arus kebudayaan mejadi alernatif penting dalam memperhatikan identitas nasional guna memperkuat integrasi nasional bangsa. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan berbagai elemen yakni pemerintah melalui regulasi tentang kebudayaan, peran lembaga pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan peran masyarakat.

Referensi

Gottschlak, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Kenikmatan*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia.

Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia:Kebijakan Budaya Selama Abad 20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), https://kbbi.web.id/nasionalisme, diakses 27 Desember 2018.

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Smith, A. D. (2002). *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.

Suparto, A. (2000). *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*. Jakarta:STF Driyakarya.

Tim Penulis, (2015). *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern.* Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penulis. (1996). *Integrasi Nasional, Suatu Pendekatan Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1949.

Wahyuni, A. A. A. R. (2015). *"SUWUNG" Membawa Seni Dalam Panggung Nasionalisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Sebuah Tinjauan Sejarah*. Laporan Penelitian Universitas Udayana.